

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Fungsi penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat desa dapat dipandang sebagai langkah yang paling efektif untuk memberdayakan potensi masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Fungsi pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumberdaya untuk mencapai sasaran organisasi kemasyarakatan yang lebih baik untuk kesejahteraan hidup penghidupan masyarakat. Karena itu usaha program kelompok tani di Desa Weelibo yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjangkau kesemua elemen dan lapisan masyarakat di desa. Dengan demikian semua lapisan masyarakat dapat merasakan perubahan ini meliputi proses perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan menuju kemandirian dan perubahan struktur ekonomi masyarakat yang terkait dengan pengalokasian sumber daya, penguatan kapasitas sosial ekonomi dan pengembangan usaha.

5.1 Fungsi penyuluh pada pemberdayaan masyarakat

Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengkaji atau menganalisis fungsi penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Weelibo dari sejumlah aspek sosial ekonomi yang terkait dengan penguatan kapasitas untuk mengelola program pertanian yang ada di Desa Weelibo Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat yakni:

5.1.1 Pemberian pendidikan, pelatihan tentang keterampilan dan IPTEK

Pemberian keterampilan merupakan salah satu faktor pendukung tercapai suatu tujuan dan sasaran yang di tujui atau ingin dicapai, sehingga keterampilan diartikan sebagi kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik, tepat, cepat dan maksimal. Namun keterampilan juga akan dicapai atau ditingkatkan dengan latihan dan tindakan berkelanjutan dan berkesenambungan. Pemberian pendidikan dan keterampilan dalam pengembangan pengelolaan program tani yang baik pengetahuan dan persiapan pengelolaan lahan pertanian. Teknologi dapat digunakan sebagai usaha dalam meningkatkan usaha masyarakat miskin, maka teknologi juga dapat dibentuk metode baru dalam berproduksi. Untuk meningkatkan hasil produksi sawah, maka teknologi menjadi salah satu faktor penting karena dengan penggunaan teknologi dan metode baru. Masyarakat diharapkan akan mendapatkan hasil produksi yang berkualitas, teknologi yang dimaksud antara lain; traktor, alat potong padi, rontok, alat semprot, dan pacul.

Gambar 2
Hasil tentang pemberian pelatihan keterampilan pembuatan pupuk organik atau pupuk bokhasi



Dokumentasi diambil tanggal 06 pebruari 2019 di Desa Weelibo

Gambar 2 di atas merupakan dokumentasi dari pemberian pelatihan pembuatan pupuk bokhasi yang diberikan oleh penyuluh lapangan kepada kelompok tani sawah di Desa Weelibo dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk bokhasi adalah kotoran hewan, serbuk kayu, abu sekam, daun gamal, EM 4, batang pisang yang sudah diiris kecil dan setelah dicampur bahan-bahan yang ada, dilepaskan beberapa hari dan ditutup dengan terpal. Pemberian pelatihan tersebut bertujuan membentuk dan menghasilkan kelompok yang dapat bekerja mandiri dalam pembuatan pupuk yang dapat diperoleh dari alam atau kotoran ternak, sehingga kelompok tani sawah tidak harus membutuhkan biaya yang besar dalam pengelolaan lahan persawahan. Tetapi pelatihan tersebut tidak dapat diserap dan diperaktekkan oleh anggota kelompok tani, hal ini hanya dapat membuang anggaran desa dengan Cuma-Cuma karena pelatihan pembuatan pupuk tidak bisa diperaktekkan oleh anggota kelompok tani, ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan anggota kelompok tani yang ada di Desa Weelibo.

Gambar 3
Hasil tentang pemberian pelatihan cara penanaman yang baik yang dapat ditiru oleh anggota kelompok tani sawah



Dokumentasi diambil tanggal 04 pebruari 2019 di Desa Weelibo

Gambar 3 diatas merupakan dokumentasi dari pemberian pelatihan cara menanam yang diberikan oleh petugas penyuluh lapangan, dan telah dapat diperaktekkan atau dilakukan oleh anggota kelompok tani sawah di Desa Weelibo, alat-alat yang digunakan dalam melakukan cara menanam yang benar adalah kayu, tali dan disertai dengan ukuran, ukuran yang maksud adalah jarak tanam yang direkomendasikan 20 Cm dan sistem tanam legowo 50 Cm. Jarak tanam yang terlalu rapat dikarenakan pertumbuhan akan memanjang, tanaman saling menaungi, sehingga berpotensi menyebabkan anakan sedikit. Pelatihan ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh petugas penyuluh untuk memberikan keterampilan yang baik dan benar kepada kelompok tani sawah agar dapat meningkatkan hasil produktifitas, hal ini juga dapat mempermudah para kelompok tani dalam melakukan aktifitas, seperti pada saat penyemprotan dan penyebaran pupuk. pemeliharaan, atau penyiaagaan.

Gambar 4

Hasil tentang pemberian pelatihan cara penyemprotan yang baik dan yang dapat ditiru oleh anggota kelompok tani sawah



Dokumentasi diambil tanggal 05 pebruari 2019 di Desa Weelibo

Gambar 4 diatas merupakan pelatihan yang diberiakn oleh penyuluh maupun pemerintah kepada kelompok tani, dan dan telah dapat diperaktekkan atau dilakukan oleh anggota kelompok tani sawah yang ada di Desa Weelibo. Pelatihan ini merupakan usaha yang dilakukan oleh penyuluh untuk memberikan keterampilan kepada anggota kelompok dalam pencegahan atau pemberantasan hama yang baik dan benar. Adapun cara penyemprotan yang baik dan benar sesuai dengan pelatihan yang diberikan sebagai berikut:

1. Waktu yang tepat untuk penyemprotan

Waktu penyemprotan padi yang tepat adalah ketika mulut daun padi (Stoma) terbuka, kalau dilihat dari segi jam adalah padi hari sampai jam 9:00 dan sore hari sekitar jam 15:30 sampai jam 17:00. Kenapa

tidak boleh menyemprot diatas jam 9:00-15-30, karena pada jam tersebut stoma akan tertutup sehingga kurang efektif untuk menyemprot.

2. Menyemprot padi pada bagian yang tepat

Agar penyemprotan pestisida efektif, maka semprotlah pada seluruh bagian tanaman. Jika penyemprotan hanya untuk memberikan pupuk atau nutrisi daun, maka bagian daun saja yang harus disemprot. Namun demikian sebenarnya seluruh bagian tanaman padi pada penyerap pupuk.

3. Perhatikan kondisi cuaca

Waktu penyemprotan padi yang tepat adalah antara pagi hari sebelum jam 9:00 dan jam 15:30-17:00. Meskipun demikian kondisi cuaca juga perlu diperhatikan. Jangan menyemprot tanaman pada saat musim hujan, penyemprotan tanaman padi yang efektif adalah pada saat kondisi cuaca cerah. Jika menyemprot padi pada saat musim hujan, maka kerja kita sia-sia. Bagaimana tidak kita habis menyemprot dan belum ada satu jam sudah turun hujan, maka pestisida maupun pupuk yang kita semprotkan akan hilang terkena air hujan.

Gambar 5

Hasil tentang pemberian pelatihan cara pemupukan yang baik dan dapat ditiru oleh anggota kelompok tani



Dokumentasi diambil pada tanggal 07 pebruari 2019 di sawah Desa Weelibo

Gambar 5 diatas merupakan pelatihan yang diberikan oleh penyuluh kepada kelompok tani dan dapat ditiru oleh anggota kelompok, untuk pemupukan pertama dilakukan ketika padi berumur 7-15 hari setelah ditanam. Bisa digunakan jenis pupuk urea plus TPS yang dicampur dengan takaran dosis sekitar 100:50 kg/ha. Atau bisa disesuaikan dengan tanaman sendiri. Untuk pemberian pupuk pada tahap berikutnya bisa dilakukan ketika tanaman padi telah berumur 25-30 hari. Gunakan pupuk jenis jenis pupuk urea 50 kg/ha serta pupuk NPK 100 kg/ha. Dan proses pemupukan terakhir dapat dilakukan ketika tanaman berusia 45-50 hari bisa menggunakan pupuk urea dengan campuran phonska skala perbandingan sendiri perkiraannya 50:50 kg/ha.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dan hasil observasi peneliti di lapangan tentang pemberian pelatihan, keterampilan dan teknologi untuk menciptakan pekerja atau kelompok tani yang potensial. Maka dapat dilihat dari segala usaha yang dilakukan pemerintah maupun penyuluh dengan pemberian pelatihan pembuatan pupuk organik kepada anggota kelompok tani namun pelatihan tersebut tidak dapat ditiru atau diperaktekkan oleh kelompok tani, dan yang dapat diperaktekkan oleh kelompok tani yakni cara tanam, penyemprotan dan pemupukan yang baik. Karena adanya keinginan pemerintah untuk membentuk kelompok tani sawah yang berkerampilan dan mandiri dalam pengelolaan usaha tani maka pemerintah memberikan sarana alat semprot, traktor, dan alat potong padi. Penyediaan alat-alat tersebut merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh oleh pemerintah sebagai dasar untuk menghasilkan kelompok tani yang mandiri, berkualitas dan potensial, sehingga kelompok tani mendapatkan penghidupan yang sejahtera. Adapun hasil wawancara dari informan sebagai berikut:

“menurut penjelasan dari Bapak Camat Timotius T. Ragga, pemberian pelatihan dan keterampilan sudah pernah diberikan oleh pemerintah maupun penyuluh, baik itu pelatihan pembuatan pupuk organik (pupuk yang diolah dari berbagai macam daun), cara tanam modern, cara pembuatan obat-obatan organik, cara pemberian pupuk dan pembasmian hama (penyakit) melalui semprot. Tidak hanya pemberian pelatihan dan keterampilan, tetapi pemerintah juga memberikan beberapa alat seperti alat semprot, alat pemotong padi, rontok dan pacul.

Lebih lanjut lagi, Bapak Lowa Bole selaku kepala Desa Weelibo, Anderias

Ledi Banyo selaku sekretaris Desa mengatakan sebagai berikut:

“Mengenai pemberian pelatihan, keterampilan dan teknologi kami selaku elemen Desa Weelibo sudah berupaya memberikan pelatihan dan keterampilan kepada kelompok tani sawah yang telah terbentuk, mulai cara pengolahan lahan, penyebaran penih, pemberian pupuk, cara

semprot, dan penggunaan alat (teknologi) yang sudah diberikan, dalam melaksanakan hal ini saya juga selaku aparat Desa bekerja sama dengan dinas terkait (Dinas Pertanian)”.

Hal ini kembali dijelaskan oleh Stefanus M. Landa selaku penyuluh lapangan di Desa Weelibo, sebagai berikut:

“Saya sebagai petugas penyuluh lapangan (pendamping) di Desa Weelibo yang ditempatkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, saya sudah berupaya membimbing untuk memberikan pelatihan dalam membentuk keterampilan dan sistem pengolahan lahan serta cara tanamam dan cara penggunaan teknologi dengan baik dan benar kepada kelompok pertanian yang ada di Desa Weelibo”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, menggambarkan bahwa usaha pemerintah setempat baik pemerintah Desa, pemerintah kecamatan dan penyuluh (pendamping) Desa Weelibo dalam pemberian pelatihan, keterampilan dan penggunaan teknologi sudah diperaktekkan dimasing-masing kelompok pertanian yang dibentuk oleh pemerintah. Adapun pelatihan telah diberikan kepada kelompok pertanian oleh pemerintah setempat dan petugas penyuluh lapangan dalam pembuatan pupuk organik, tetapi para kelompok tani ini masih menggunakan pupuk bersubsidi. Hal ini di karenakan kurangnya pengetahuan kelompok pertanian terhadap pengolahan pupuk organik, sehingga hal ini berakibat pada penambahan modal atau lebih besarnya biaya yang disiapkan oleh kelompok tani untuk menunjang berjalan dan kelancarannya usaha tani mereka. Lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap tinforman Bapak Kedu Lere Rada sebagai berikut:

“Dari 4 kelompok pertanian yang dibentuk oleh pemerintah, memang kami sudah diberikan pelatihan, tetapi apa yang diberikan atau diajarkan oleh petugas dan pemerintah, kami tidak bisa olah sesuai yang diinginkan dan juga tidak sesuai dengan keperluan dari tanaman padi. Jadi kami semua dari anggota kelompok yang ada pakai pupuk toko. Akhirnya kami masih butuh banyak uang untuk melancarkan program tani kami,

dan ini menjadi penghambat juga untuk petani, karena modal yang kurang”.

Lebih lanjut lagi, hasil wawancara di atas sesuai dengan yang di utarakan

oleh informan Bapak Boko Lara Bange mengatakan bahwa:

“kami memang sudah dapat pelatihan mengenai pembuatan pupuk atau cara pembuatan obat-obatan secara organik atau pupuk yang bahan-bahannya mudah kami dapat, akan tetapi cara pengolahan dari bahan tersebut kami tidak bisa meniru. Hal ini pada dasarnya kami tidak bisa buat, sehingga kami membeli pupuk serba gampang (pupuk bersubsidi/tokoh), sekalipun harganya mahal kami tetap berusaha untuk membelinya agar tanaman kami bisa ditarukan pupuk, karena kalau kami tidak belikan pupuk ini, kami tidak bisa panen hasil pertanian kami”.

Berkaitan dengan ketrampilan yang diberikan oleh penyuluh (pendamping)

kepada kelompok pertanian di Desa Weelibo, menggambarkan kelompok tani

yang ada tidak bisa mengolah pupuk organik tersebut. Seperti hasil wawancara

dari informan Bapak Wula Tabba Nipa, mengatakan bahwa:

“saya sebagai ketua kelompok tani juga sudah berusaha untuk mengakomodir anggota kelompok untuk membuat atau mengolah pupuk organik sesuai yang diajarkan, dan usaha pemerintah ini juga kami mengapresiasi tetapi pada dasarnya karena kurang pengetahuan dan kemampuan sehingga kami tidak bisa diterapkan pelatihan yang telah diajarkan pada kami terutama pada pembuatan pupuk organik dan obat-obatan organik. Dari pelatihan yang kami dapatkan hanya cara tanam, cara pemupukan, cara pengobatan serta penggunaan alat-alat seperti rontok, traktor, pemotong padi, pompa air dan alat penyemprotan”.

Tidak jauh beda dengan pernyataan dari informan atau petani sawah Bapak

Reko Deta, mengatakan bahwa:

“selama ini kami belum bisa sama sekali merasakan dampak dari pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah bersama petugas penyuluh di Desa Weelibo, kami semua yang masuk dalam kelompok tani sampai saat ini kami masih menggunakan pupuk toko, karena memang kami ini orang-orang yang tidak tamat SMA jadi kami tidak mengerti dengan apa yang mereka sampaikan mengenai proses pengolahan pupuk secara organik. Bahkan penggunaan alat-alat pertanian saja masih bingung dalam penggunaannya seperti alat pemotong padi.”

Pernyataan diatas sejalan dengan hasil wawancara peneliti dari informan

Bapak Agustinus Kedu Lere, yang mengatakan bahwa:

“tentang pelatihan, keterampilan dalam pembuatan pupuk, pembuatan obat-obatan, cara tanam, cara memberikan pupuk itu hanya baru beberapa kali diajarkan oleh penyuluh serta pemerintah, dan yang kami dapat lakukan itu baru cara tanam dan pemberian pupuk. Dan saya sendiri sebagai salah satu anggota kelompok Suka Maju baru beberapa kali mengikuti pelatihan yang di adakan oleh penyuluh (pendamping) baik pemerintah Desa Weelibo. Kalau menyangkut dengan pembuatan pupuk dan obat-obatan itu sama sekali kami tidak dapat membuatnya atau mengelolanya. Ini disebabkan dari kami sendiri masih minim pengetahuan, soalnya kami ini bukan orang yang sekolah tamatan sekolah SMA. Jadi sulit bagi kami untuk mengikuti arahan dari petugas dalam pembuatan pupuk organik dan obat-obatan”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari beberapa informan ketua kelompok dan ketua kelompok, memberikan gambaran mengenai minimnya pengetahuan anggota kelompok pertanian terhadap pelatihan dan keterampilan terhadap proses pengolahan pupuk organik dan obat-obatan organik, sehingga menyulitkan para kelompok tani dalam mendapatkan pupuk yang sebenarnya mengurangi beban modal usaha kelompok tani. Jika saja para kelompok tani bisa memanfaatkan pelatihan ini secara baik atau mampu untuk mengelola dan membuat pupuk dan obat-obatan ini, maka sangat mungkin perkembangan kelompok tani sangat besar kemungkinannya, karena jika sudah mampu dalam mengelolah pupuk dan obat-obatan organik secara mandiri, maka biaya dan modal yang dikeluarkan akan berkurang, sehingga pendapatan atau pemasukan lebih besar dari pada pengeluaran. Namun sangat disayangkan karena dari pelatihan yang diberikan pemerintah lewat penyuluh pertanian kepada kelompok tani tidak dapat diserap oleh anggota kelompok tani. Penguasaan teknologi pemerintah sudah menurunkan alat-alat berupa traktor, rontok, alat pemotong, pompa air dan penyemprotan. Adapun yang dapat diserap oleh anggota kelompok tani hanya berkisar pada cara penanaman, cara pemupukan, cara penyemprotan, serta cara

penggunaan alat-alat pertanian yang telah dibagikan oleh pemerintah setempat berupa alat semprot, alat pemotong padi, rontok, traktor dan mesin pompa air.

5.1.2 Penguatan Modal Usaha Dalam Bentuk Hibah Dan Kredit

Penguatan modal merupakan kebutuhan bagi kelompok usaha bidang sosial ekonomi karena modal merupakan salah satu pilar dari aktivitas lembaga yang didirikan. Agar kelompok usaha dapat di kembangkan dengan baik, maka pemupukan modal perlu dilakukan secara teratur dan terus menerus, modal dalam bentuk uang biasanya diperoleh melalui hibah dan kredit. Modal dalam bentuk hibah yaitu modal yang diberikan secara Cuma-Cuma dari pemerintah guna menggerakkan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyukseskan kegiatan. Sedangkan modal dalam bentuk kredit yaitu modal yang diberikan kepada masyarakat namun modal tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah.

Penguatan modal harus dikelola secara tertib dan transparan dengan perpegangan pada lima prinsip pokok yaitu:

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat secara terbuka sebagai kelompok sasaran.
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis.
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

5. Pengelolaan dana pelestarian hasil dapat dengan mudah digulir dan dikembangkan oleh masyarakat desa dalam lingkup yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan fungsi penyuluh pertanian (pendamping) bahwa sebenarnya ada bantuan modal hibah dari Dinas Pertanian dan ada juga program Desa seperti anggur merah kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Desa Weelibo namun hanya diperuntukan bagi peternak dalam bentuk pembagian ternak, sapi, kuda babi, kambing dan bebek. Sedangkan para petani sawah diberikan alat berupa traktor, alat pemotong padi, mesin pompa, alat semprot (solo) dan benih. Traktor yang diturunkan oleh Dinas Pertanian kepada kelompok tani sawah sebanyak 4 (unit) traktor ini memperoleh sebanyak

Menurut penjelasan dari Bapak Camat Timotius T. Ragga, mengatakan bahwa:

“Mengenai bantuan dari pemerintah baik itu dari dinas pertanian untuk para kelompok tani sudah diberikan yakni alat traktor, mesin pompa air, alat potong padi, alat semprot (solo), terval, pacul dan benih, juga diberikan bantuan dana atau modal secara kredit dengan persyaratan sertifikat tanah atau hasil panen sebagai jaminan. Pemerintah meminta jaminan agar masyarakat berusaha mengelola dana yang diberikan secara semaksimal mungkin agar mereka bisa mengembalikan dana yang diberikan oleh pemerintah, kalau tidak dimintai jaminan maka mereka tidak akan berusaha untuk mengembalikan dana kredit tersebut. Oleh karena itu pemerintah menekankan untuk memberikan jaminan untuk mendapat bantuan modal kredit”.

Lebih lanjut menurut Bapak Lowa Bole, sebagai kepala Desa Weelibo, Anderias Ledi Banyo sebagai Sekretaris Desa dan Stefanus M. Landa sebagai petugas penyuluh lapangan Desa Weelibo mengatakan bahwa:

“mengenai bantuan modal sudah berupaya menurunkan beberapa alat pertanian berupa traktor, rontok, alat semprot, benih, pacul, terpal kelompok, dan irigasi. Namun bahan-bahan yang sudah diberikan oleh pemerintah, tetapi belum bisa menggunakannya dengan baik, contohnya traktor atau rontok yang ada, hanya segelintir orang yang merasakan atau tidak semua anggota kelompok menggunakan alat tersebut, dan contoh lain yakni irigasi yang seharusnya dijaga dan dibersihkan untuk menjaga kelancaran aliran air tidak digunakan dengan baik atau dibersihkan, dan bahkan sebagian masyarakat lainnya merusak atau melubangi saluran air untuk mengaliri air menuju ke sawahnya mereka dengan cepat, tidak mau mengikuti aliran pembagian yang sudah dibuat atau sudah ada”.

Berdasarkan penjelasan dari pemerintah dan penyuluh pertanian (pendamping), sudah ada usaha untuk memenuhi keperluan atau peralatan pertanian pada kelompok tani, untuk membentuk kelompok tani yang berpotensi dan mampu mandiri dalam program tani. Sejauh dalam penggunaan alat tersebut kelompok tani itu sendiri tidak dapat mengelola sarana yang ada, karena kurangnya kesadaran sehingga penggunaannya tidak sama rata atau tidak semua anggota kelompok tani menggunakannya. Adapun bantuan modal dan kredit yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani, namun bantuan ini masih memiliki syarat untuk mendapatkannya yakni dengan cara memberikan sertifikat tanah atau hasil panen kepada pemerintah.

Dan sejumlah informan yang ditemui peneliti mengungkapkan bahwa penguatan modal secara kredit dengan syarat harus dengan jaminan hasil panen atau harus sertifikat tanah justru sangat memberatkan dan tidak bisa dipenuhi oleh petani sawah. Berikut petikan hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dirangkum penulis:

“Bapak Thomas Hewa dan Bapak Kedu Lere Rada yang mengatakan bahwa: sejak awal kami mengerjakan lahan pertanian, kami sebagai petani sawah sangat membutuhkan bantuan modal. Tetapi bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas dan hanya pernah diberikan 1 kali pada tahun 2010 dalam bentuk hibah dan untuk bisa mendapatkan

bantuan modal itu harus mempunyai jaminan seperti sertifikat tanah atau sawah, bantuan dari pemerintah hanya berupa traktor, alat pemotong padi, alat penyemprot hama dan benih padi, selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan berupa uang kecuali mempunyai jaminan untuk digadai, syarat kami harus memiliki sertifikat tanah sebagai jaminan. Jaminan sertifikat tanah tentu sangat membebani dan menyulitkan kami sebagai petani sawah karena sawah yang ada di Desa Weelibo pada umumnya belum memiliki sertifikat. Akibat dari itu banyak lahan sawah tidak dikerjakan dan di biarkan begitu terlantar, untuk mengatasi kekurangan modal yang kami alami, ada beberapa petani sawah terpaksa bekerjasama dengan pemilik modal dengan sistem bagi hasil dan bahkan ada sebagian areal sawah terpaksa menggadai dan menjual kepada orang lain karena tidak ada jalan keluar”.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa banyak petani yang mengalami kekurangan modal, karena petani sawah mengalami kesulitan modal usaha maka petani sawah lainnya telah menggadai dan menjual sawahnya, sehingga banyak areal sawah yang tidak bisa digarap dan dibiarkan begitu saja bahkan sejumlah petani sawah terpaksa bekerja sama dengan pemilik modal untuk mengatasi masalah kesulitan permodalan sehingga hasil panennya akan dibagi secara merata dengan pemilik modal. Adapun bantuan yang diterima oleh kelompok tani sawah tersebut diatas di Desa Weelibo sebanyak Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupaiah) pada tahun 2010 yang hanya diterima satu kali oleh kelompok tani sawah, namun bantuan tersebut tidak menjamin atau mencukupi kebutuhan modal yang diperlukan oleh kelompok tani sawah, sehingga masih ada anggota kelompok tani sawah yang mengalami kekurangan. Akibatnya banyak yang mengalami dan bahkan menjual sawahnya, juga ada yang terpaksa bekerjasama dengan pemilik modal dengan syarat membagi rata hasil produksi atau hasil panen yang diperoleh oleh kelompok tani di Desa Weelibo.

Dalam berjalannya program kelompok tani berdasarkan hasil wawancara peneliti dari informan Bapak Wula Tabba Nipa mengatakan bahwa:

“saya sebagai ketua kelompok tani Liku Horomale menilai bahwa pemerintah baik petugas penyuluh kurang memperhatikan masalah yang kami alami, seperti bantuan modal untuk menunjang kelancaran atau berjalannya program pertanian kami, tetapi karena pemerintah kurang berperan aktif dalam mengontrol program pertanian, sehingga banyak dari anggota kelompok saya yang tidak menggarap sawah milik mereka karena tidak memiliki modal yang cukup. Karenanya kelompok pertanian kami pun tidak berjalan lancar seperti kelompok lainnya”.

Berdasarkan pernyataan informan diatas dari hasil wawancara peneliti, memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kurangnya peran pemerintah baik petugas penyuluh (pendamping) dalam mengontrol dan memberikan bantuan modal yang cukup dan meringankan beban kelompok tani. Pemerintah sebenarnya harus memberikan perhatian yang cukup dalam hal modal atau keperluan-keperluan lain seperti obat-obatan dan pupuk, terutama anggota kelompok pertanian yang memiliki lahan yang cukup tetapi mengalami kesulitan dan memperoleh modal, pupuk, obat-obatan, sehingga dapat memberikan bantuan yang membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan atau mengelolah lahan pertanian, sehingga dapat menghasilkan pekerja-pekerja yang berkualitas, handal atau potensial.

Berikut ini gambar lokasi sawah yang tidak dikerjakan dan dibiarkan begitu saja oleh para petani sawah Desa Weelibo.

Gambaran 6
Lahan sawah yang tidak dikerjakan dan dibiarkan begitu saja didesa Weelibo Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.



Dokumentasi diambil pada tanggal 10 pebruari 2019 di sawah Desa Weelibo

Gambaran 6 diatas terlihat adanya lahan sawah di Desa Weelibo dengan luas lahan 12 hektar yang tidak dikerjakan dan dibiarkan begitu saja sehingga ditumbuhi oleh tumbuhan liar sehingga menjadi tempat gembala hewan, jika dibiarkan demikian maka usaha petani sawah yang ada didesa weelibo dapat berpindah tangan kepada para pemilik modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan observasi serta dokumentasi diatas menggambarkan banyak masalah yang dihadapi oleh petani sawah di Desa Weelibo diakibatkan karena masih terbatasnya kemampuan modal petani sawah itu sendiri dalam upaya untuk meningkatkan produksi sawah

tersebut. Sedangkan bantuan modal yang pernah diberikan oleh Dinas Pertanian dan perkebunan hanya satu kali saja pada tahun 2010 bentuk uang sebanyak Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Bantuan yang berbentuk hibah ini pun tidak mampu menjangkau keperluan petani untuk melengkapi bahan-bahan atau obat-obatan yang diperlukan karena dana yang diberikan sangat minim. Untuk menunjang bantuan hibah ini, petani mengambil jalan lain dan mencari sumber bantuan berupa kredit dengan syarat menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk mendapatkan bantuan kredit tersebut. Hal ini juga menyulitkan sebagian petani karena harus membagi hasil pertanian mereka kepada sumber bantuan yang ada, sehingga pendapatan atau keuntungan mereka sangat menurun (hanya kembali modal dasar) bahkan sebagian petani mengalami kerugian. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah setempat yang seharusnya diharapkan dapat membantu petani sawah di Desa Weelibo, namun dalam prakteknya kurang berperan aktif dalam menyediakan bantuan modal yang sangat dibutuhkan oleh para petani sawah.

Berdasarkan keluhan dari informan yang diwawancarai peneliti, maka pemerintah dan petugas penyuluh dalam pemberian bantuan modal pada kelompok tani sawah kedepannya lebih baik dan maksimal untuk menunjang kelancaran usaha pertanian, dengan demikian perkembangan usaha tani tersebut dapat menunjang penghidupan masyarakat setempat.

Gambaran 7
Lahan sawah yang dijangkau (A) dan yang tidak dijangkau oleh
irigasi atau drainase air (B) di Desa Weelibo Kecamatan Lamboya
Kabupaten Sumba Barat

A

B



Dokumentasi diambil pada tanggal 09 pebruari 2019 di sawah Desa Weelibo

Gamabar 7 A diatas menunjukkan salah satu usaha pemberdayaan yang sudah direalisasikan oleh pemerintah, ini adalah salah satu usaha pemerintah untuk menunjang kelancaran program kelompok tani. Karena air merupakan salah satu faktor utama yang sangat dibutuhkan dalam usaha pertanian. Usaha penyaluran air yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menjangkau seluruh bagian daerah persawahan, ini merupakan fungsi pemerintah untuk menciptakan petani yang potensial dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan dapat menghasilkan petani yang mandiri dalam usaha kelompok tani. Sedangkan digambar B merupakan bagian lahan persawahan dari sebagian kelompok tani yang tidak dapat digarap dengan luas lahan 8 hektar, lahan ini tidak dapat digarap karena fasilitas yang diadakan oleh pemerintah seperti yang tertera digambar A masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan beberapa dari

kelompok tani di Desa Weelibo kurang aktif dalam mengelola lahan pertanian yang ada, karena sumber air yang terbatas atau tidak dapat menjangkau sebagian lahan pertanian. Berkaitan dengan penjelasan diatas, sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari informan atau anggota kelompok, menurut Bapak markus Haba:

“kami dari kelompok tani lega manis sangat membutuhkan sarana yang dapat membantu kelancaran penyaluran air menuju ke lokasi persawahan. Dan kami berharap pemerintah dapat memberikan bantuan berupa uang, agar kami bisa membeli alat yang dapat membantu kami untuk mengelola lahan seperti mesin pompa dan selang air. Kelompok kami ini tidak maju atau mecet karena kekurangan air, kami dapat bekerja dengan baik itu hanya pada saat musim hujan. Jadi musim-musim seperti kemarau kami tidak bisa bertani atau tidak bisa mengelola lahan, walaupun kami terpaksa bertani pada saat musim kemarau, karena hasilnya pasti tidak bagus atau dapat hasil setengah-setengah bahkan kami tidak dapat sama sekali (kosong). Jadi sebagian dari kelompok kami tidak aktif pada musim kemarau, kami hanya bisa olah lahan hanya pada saat musim hujan”

Senada dengan hasil wawancara peneliti dengan informan Ruben L. Lere

yang mengatakan bahwa:

“rata-rata kami yang termasuk dalam usaha kelompok tani sawah adalah orang-orang yang kurang mampu, jadi kami dalam hal kebutuhan keuangan maupun kebutuhan lainnya, kami sangat butuh bantuan modal yang cukup dari pemerintah untuk melancarkan pengelolaan pertanian, atau dalam bentuk mesin pompa supaya kami bisa melancarkan pengelolaan lahan pertanian kami yang ada baik pada musim hujan maupaun pada musim kemarau”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan menunjukkan sudah ada usaha pemerintah baik penyuluh pertanian (pendamping) untuk mengusahakan penyebaran air di daerah persawahan, namun sebagian lahan pertanian memang belum menjangkau secara keseluruhan dengan sarana yang sudah dibangun oleh pemerintah, sehingga masih banyak kejanggalan atau problem yang terjadi dalam kelompok tani, seperti macetnya atau terbatasnya air

yang tersedia, juga berhentinya pengolahan pertanian dari beberapa anggota kelompok tani, karena modal berupa uang yang terbatas pula, kelompok tani ini tidak bisa menjalankan program dan tidak bisa menyewa mesin pompa, sehingga kelompok tani ini mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk menunjang kemajuan program mereka.

5.1.3 Akses Terhadap Pemasaran Hasil Produksi

Akses terhadap pasaran adalah faktor utama dalam segala kegiatan ekonomi. Maka pemasaran kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah baik oleh penyuluh pertanian guna untuk menjaga kestabilan nilai jual atau harga produk-produk yang akan dipasarkan oleh masyarakat kepada pemodal besar yang bisa memainkan atau menekan harga barang, sehingga berakibat pada menurunnya nilai jual barang yang dihasilkan oleh masyarakat atau para kelompok tani yang ada di Desa Weelibo. Menjaga kestabilan harga merupakan salah satu cara untuk menunjang atau meningkatkan angka pendapatan yang dihasilkan oleh kelompok tani, dengan demikian perkembangan dan kemajuan program kelompok tani akan terus berjalan dengan baik, sehingga taraf kehidupan masyarakat atau kelompok tani semakin mandiri, maju dan sejahtera.

Berkaitan dengan hasil wawancara dengan para informan tentang pemasaran hasil produksi pertanian diketahui bahwa pemasaran hasil usaha ini tidak dilakukan langsung dipasar-pasar terdekat, tetapi masih banyak dari anggota kelompok yang menggunakan metode menampung dirumah masing-masing. Hasil usaha pertanian ini dapat dipasarkan ketika ada keperluan masyarakat yang

mendadak atau keperluan yang menyangkut dengan biaya pendidikan anak. Pemerintah Desa sebenarnya sudah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menarik hasil produksi pertanian dari kelompok tani. Sebenarnya adanya BUMDes ini sangat membantu masyarakat dalam pemasaran hasil produk, tetapi karena kurang dimanfaatkan oleh petugas yang mengelola BUMDes tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk menarik semua hasil produk yang dihasilkan oleh kelompok pertanian di Desa Weelibo. Hal ini juga tidak hanya kurangnya pengelolaan BUMDes oleh badan pengelola, namun disisi lain dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjual hasil produk mereka pada badan usaha milik desa, melainkannya mereka menjual ditempat lain. Berikut petikan wawancara peneliti dengan Bapak Lowa Bole selaku Kepala Desa Weelibo, mengatakan bahwa:

“Pemerintah telah menyediakan atau membangun Badan Usaha Milik Desa, dengan tujuan membantu masyarakat dalam pemasaran hasil produk pertanian mereka. Pemerintah sudah berusaha menunjang penghidupan kelompok tani atau masyarakat. Namun kebanyakan dari anggota kelompok tani di Desa Weelibo menjual hasil produk mereka di toko. Anggota kelompok tani langsung menjual hasil produk mereka ke kota dengan alasan mereka langsung membeli apa yang menjadi keperluan mereka. Yang mau menjual hasil usaha mereka di BUMDES hanya sebagian saja dari kelompok tani”.

Berikut juga diungkapkan oleh petugas penyuluh pertanian Bapak Stefanus

M. Landa yang mengatakan bahwa:

“kami sudah pernah mengadakan sosialisasi agar pemasaran hasil produk kelompok tani ini dipasarkan atau ditarik langsung oleh Dinas Pertanian untuk ditampung sebagai bibit nanti pada musim berikutnya, bisa juga juga untuk diekspor keluar kalau padinya bagus. Tetapi kebanyakan juga anggota kelompok tani yang tidak mau memberikan hasil produk mereka, masih mau menampungnya dirumah masing-masing, dan ketika ada keperluan baru mereka pasarkan, namun pemasarannya langsung ke kota”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, memberikan gambaran bahwa sudah ada usaha pemerintah desa baik Dinas Pertanian untuk menarik langsung hasil produk pertanian masyarakat di Desa Weelibo dengan cara membantu masyarakat atau anggota kelompok tani. Dengan cara ini merupakan salah satu usaha untuk membangun masyarakat atau kelompok tani yang berkembang atau maju dalam usaha kelompok pertanian mereka. Dalam Pemesaran hasil produk anggota kelompok tani, hanya sebagian yang memberikan atau memasarkannya di BUMDes atau pun Dinas Pertanian, sedangkan sebagian anggota kelompok tani lainnya tidak mau menjual hasil produk mereka, tetapi masih memilih untuk menampungnya di rumah masing-masing, adapun hasil produk pertanian anggota kelompok tani mau dipasarkan, mereka lebih banyak memilih untuk menjualnya ke kota atau di toko-toko cina. Berikut ini petikan hasil wawancara peneliti dengan anggota kelompok tani di Desa Weelibo yakni;

“Bapak Kedu Lere mengatakan bahwa hasil produk pertanian kelompok tani di Desa Weelibo, kebanyakan anggota kelompok tani yang mendapatkan hasil atau yang telah panen sering memasarkan hasil panen kami ke kota untuk dijual ditoko. Memang ada juga permintaan dari pemerintah untuk menjual di BUMDES baik itu di Dinas Pertanian namun kami tidak menjualnya disitu, karena memang harga produk (beras) juga tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yakni dengan nilai jual Rp. 7.000/Kg, tetapi ditempat lain ada yang mengambil produk beras masyarakat dengan nilai jual Rp. 7500/Kg bahkan ada yang ambil 8.000/Kg, sehingga para kelompok tani lebih banyak yang memilih untuk menjualnya ketempat lain dengan harga atau nilai jual yang lebih tinggi”..

Kemudian diungkapkan oleh informan pada saat wawancarai oleh peneliti

yakni bapak Boko Lara mengatakan bahwa:

“kebanyakan dari kelompok pertanian yang mendapatkan hasil atau yang telah panen tidak memasarkan hasil panen kami pada BUMDes juga di Dinas Pertanian karena harga atau nilai jualnya tidak sesuai dengan keinginan kami, hanya dikisaran 7000, sedangkan jikalau kami jual diluar

harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga di BUMDes. Kami lebih pilih untuk jualnya di kota karena apapun yang kami perlukan kami langsung membelinya tempat penjualan atau di toko pemasaran hasil panen kami, seperti keperluan pupuk, obat-obatan yang harus digunakan dalam perawatan tanaman padi, karena obat-obatan di BUMDes jumlahnya masih terbatas.”

Hal senada dengan hasil wawancara peneliti terhadap informan yakni

Bapak Markus M. Haba mengatakan bahwa:

“Setelah kami panen selama ini, kami memang tidak langsung menjualnya, tetapi kami masih menyimpannya dirumah, juga karena hasil panennya hanya pas-pas untuk kebutuhan makan sehari-hari, kalau pun kami dia lebih sedikit kami simpan untuk musim berikutnya. Dan itupun kalau kami jual hasil panen, ketika kalau kami ada keperluan yang harus kami penuhi baik itu keperluan sekolah anak, atau keperluan untuk bertani seperti keperluan pupuk, obat-obatan dan solar yang harus digunakan dalam perawatan tanaman”.

Berkaitan dengan hasil wawancara dan observasi peneliti di Desa Weelibo, memberikan gambaran mengenai proses pemasaran hasil produk atau hasil panen anggota kelompok tani di Desa Weelibo. Proses pemasaran hasil produk ada yang menjual di Dinas Pertanian baik juga di BUMDes karena memang anggota kelompok tani tersebut sudah mengambil duluan harga pemasaran dari hasil-hasil produk yang diperoleh. Disisi lain ada juga anggota kelompok tani yang menjual hasil produknya di tempat lain atau di kota dengan harga yang memuaskan anggota kelompok tani tersebut masih jauh lebih baik atau harga yang cukup memuaskan bagi mereka, dan pada dasarnya dari hasil observasi peneliti juga ada perbedaan nilai yang terjadi antara Dinas Pertanian baik BUMDes dan di kota, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memasarkan hasil produk mereka ke kota dengan nilai jual yang lebih baik. Adapun pernyataan dari anggota kelompok tani tentang pemasaran hasil; produk atau hasil panen mereka di kota karena pada dasarnya kebutuhan pangan atau kebutuhan dalam program pertanian bisa

langsung didapatkan atau beli di toko secara langsung, kebutuhan yang dimaksudkan tersebut seperti pupuk dan obat-obatan. Sedangkan dari beberapa anggota kelompok tani masih ada yang menggunakan metode menampung di rumah masing-masing, karena rata-rata dari hasil panen tersebut hanya cukup untuk makan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga. Sekalipun nantinya hasil produk tersebut di jual jikalau ada kebutuhan bersifat mendadak seperti halnya biaya pendidikan anak atau untuk pengadaan keperluan atau kebutuhan dalam perjalanan pengolahan atau perawatan tanaman, seperti halnya kebutuhan pupuk dan obat-obatan. Berikut ini akan dapat lihat petikan hasil wawancara peneliti terhadap informan Bapak Markus M. Haba mengatakan bahwa:

“dari hasil panen anggota kelompok tani biasanya dibawah kerumah masing-masing untuk menyimpannya. Mau menjualnya juga masih berat karena hasil panen ini sangat kurang, jadi kami lebih utamakan kebutuhan makan dalam rumah tangga ini, dan setelah itu jika ada keperluan lain maka kami dapat menjualnya untuk memenuhi keperluan yang ada.

Berikut dapat dilihat petikan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

terhadap informan yakni Bapak Tadu Bili yang mengatakan bahwa:

“kami biasanya dari kelompok tani tidak langsung menjual ke BUMDes atau ketempat lain tetapi kami sistem bunga kesesama masyarakat petani, dan yang nantinya dapat dibayar dimusim berikutnya atau bisa diperjual belikan dengan hewan ternak dengan harga yang sesuai dengan hasil produk yang di kasih atau diberikan, contoh kalau diberikan 5 karung seratus kg maka dapat ditukar dengan 1 ekor kuda umuran 2 tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi hasil peneliti beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para informan diatas menggambarkan bahwa para anggota kelompok tani di Desa Weelibo lebih banyak memilih untuk menyimpannya dirumah masing-masing dikarenakan kurangnya pendapatan atau kurangnya hasil panen yang diperoleh oleh anggota kelompok tani. Adapun nanti

anggota kelompok tani memiliki keperluan atau kebutuhan lain, maka anggota kelompok tani ini pun tidak menjualnya hasil produk di Badan Usaha Milik Desa yang sudah dibangun oleh pemerintah desa, tetapi anggota kelompok tani sawah ini lebih memilih untuk memasarkan atau menjualnya di tempat lain yang memiliki nilai jual yang menarik minat mereka untuk menjualnya ditempat tersebut atau kata lain dengan harga yang lebih baik. Anggota kelompok tani juga ada yang memilih untuk menggunakan hasil panen atau produk mereka dengan cara atau dengan sistem bunga dan sistem penukaran dengan hewan ternak yang seimbang atau sesuai dengan hasil produk yang diberikan kepada pembeli.